

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

**1. PETUGAS PERSIDANGAN**

Desk : 1  
 Provinsi : Lampung  
 Pimpinan Sidang 1 : Direktur TRPPB (Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP)  
 Pimpinan Sidang 2 : Direktur ANTB (Dr. Ir.Rachmat Mardiana, MA)  
 Notulis Aplikasi : Karina Rahmi Maulidya  
 Notulis Offline: Annisa Hasna Ramadhan  
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. Bappeda Provinsi Lampung 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung 3. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 4. Dinas Perindag Provinsi Lampung 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 6. Dinas Perkebuhan Provinsi Lampung 7. BPPW Provinsi Lampung	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 7. Kementerian Sosial	1. Direktorat Perkim 2. Direktorat Transportasi 3. Direktorat TRPPB 4. Direktorat Regional I 5. Direktorat IPEK 6. Direktorat Pangan dan Pertanian 7. Direktorat SDA 8. Direktorat PKPM

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

**2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
1	Pengembangan Kawasan Padi mendukung peningkatan produksi/produktivitas	98300	98300	Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Lampung Barat</li> <li>■ Kab. Tanggamus</li> <li>■ Kab. Lampung Selatan</li> <li>■ Kab. Lampung Timur</li> <li>■ Kab. Lampung Tengah</li> <li>■ Kab. Lampung Utara</li> </ul>	KEMENTERIAN PERTANIAN	<b>Diakomodir</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

					<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Way Kanan</li> <li>■ Kab. Tulang Bawang</li> <li>■ Kab. Pesawaran</li> <li>■ Kab. Pringsewu</li> <li>■ Kab. Mesuji</li> <li>■ Kab. Tulang Bawang Barat</li> <li>■ Kab. Pesisir Barat</li> <li>■ Kota Metro</li> </ul>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Sasaran Visi</b>	<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi	02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan	16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>		
		HA - Program Ketersediaan, Akses dan	4579 - Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan	001 - Area penyaluran benih padi		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		Konsumsi Pangan Berkualitas					
<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
		-	-		Dit. PP : 1. Usulan ini sudah sesuai dengan RO area penyaluran benih padi 2. Terkait alokasi dan volume akan menyesuaikan dengan pagu kementan		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
2	Pembangunan Rumah Susun Hunian ASN	1	1	Paket	Kota Bandar Lampung	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<b>Diakomodir</b> 1. Untuk usulan rumah susun sekolah pertanian didrop. 2. Yang diakomodir adalah usulan untuk Rumah Susun Peserta Diklat BPSDM. Pemprov
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	
		01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif	
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>		
		IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4971 - Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		007 - Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

Catatan dan Tanggapan			
Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
<p>Bappeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan terkait dengan pembangunan rumah susun ASN</li> <li>2. Lahan sudah milik Pemprov Lampung, sudah diusulkan pada Rakorgub tahun 2021 dan Konreg PUPR namun belum diakomodir</li> <li>3. RC sudah lengkap (surat rekomendasi, DED, dll), kebutuhan anggaran 50 M.</li> </ol> <p>Dinas PKPCK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 2 rumah susun yang diusulkan, yakni (1) rumah susun asn untuk keperluan asrama instruktur bpsdm dan peserta diklat =&gt; untuk keperluan diklat (2) Rumah susun untuk asrama siswa sekolah pertanian. akan dikembangkan boarding school</li> <li>2. Terkait sekolah pertanian, rekomendasi dari kementearan belum ada, hanya ada pernyataan dari dinas pendidikan</li> </ol>	<p>Dirjen Perumahan, Kementerian PUPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam forum Konreg bulan Maret sudah pernah dibahas, namun hasil dari Konreg bukan di tahun 2025. Hasilnya ditangguhkan karena surat gubernur usulan ini adalah ditahun 2022, perlu diperbaiki dan perlu disampaikan kembali ke balai perumahan.</li> <li>2. Usulan belum diusulkan ke SIBARU, sehingga belum bisa disampaikan kepada Menteri PUPR</li> <li>3. Usulan bisa saja masuk, namun nantinya akan tetap disesuaikan dengan prioritas Menteri</li> </ol> <p>BPIW, Kementerian PUPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomenklatur awal dan peruntukannya berbeda</li> <li>2. SIBARU merupakan hal yang sangat mendasar dalam pengusulan program, dari sistem ini DJP melakukan evaluasi awal dalam pengusulan sebuah program, untuk itu pemanfaatan perlu diperhatikan.</li> </ol>	<p>Direktorat Perkim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penyesuaian RO dalam krisna selaras, RO yang benar adalah Pembangunan Rumah Susun ASN/TNI Polri</li> <li>2. Peruntukan untuk asrama pendidikan berbeda dengan rumah susun ASN, sehingga perlu ada rekomendasi dari Kemendikbud (Rumah susun untuk pendidikan bersifat direktif dari Kemendikbud)</li> <li>3. Rumah susun ASN dapat diakomodir, namun perlu konfirmasi dari Dirjen Perumahan</li> <li>4. Rusun ASN terkait balai diklat, harus disiapkan OM dan maintenance dari Pemda ketika nantinya sudah terbangun</li> <li>5. Terkait dengan balai diklat, harus disiapkan dari pemprov provinsi maintenance dan OM jika nanti sudah terbangun</li> <li>6. Rumah susun untuk balai diklat BPSDM bisa diakomodir,</li> </ol>	<p>perlu memasukan usulan ini pada aplikasi Sibaru dan RC dilengkapi</p>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

						namun untuk rusun asrama sekolah pertanian belum bisa			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
3	Pembangunan Pelabuhan Tanah Merah Mesuji	1	0	Paket	Kab. Mesuji	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Ditolak, dengan catatan Pemerintah Provinsi harap melengkapi RC, dan menyelesaikan proses hibah		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	4637 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	RBP - Prasarana Bidang Konektivitas Darat	024 - Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional)				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
		Bappeda: 1. Provinsi Lampung merupakan lumbung pangan dan distributor pangan ke daerah lain 2. Pelabuhan Tanah Merah diharapkan bisa dikembangkan dan berfungsi untuk pelabuhan pengiriman logistik (beras, sapi,	Kementerian Perhubungan: 1. Dokumen perencanaan masih belum lengkap		Direktorat Transportasi 1. Pelabuhan tersebut masih dalam usulan Review RIPN, belum disahkan dalam dokumen RIPN 2. RIPN belum disahkan, sehingga harus menerbitkan Surat Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati, untuk dapat bisa				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		<p>telur, dan lainnya) ke provinsi lain di Indonesia</p> <p>Dinas Perhubungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RC: studi pendahuluan, DED Tahun 2023, RIPN 2023</li> <li>2. Kegiatan yang diminta adalah pembangunan fasilitas pelabuhan Tanah Merah, dengan anggaran 74 M</li> <li>3. Terdapat sedikit permasalahan lahan, diharapkan dari perusahaan CPP dapat menghibahkan lahan ke Kemenhub sekitar 55 Ha, mencakup keseluruhan pelabuhan dan jalan sepanjang 7 km</li> <li>4. Hibah masih dalam proses dari perusahaan ke Kemehub, proses hibah masih belum selesai</li> <li>5. Masih ada pelabuhan tetapi tidak berfungsi dengan efisien</li> </ol>		<p>dikeluarkan SK Penlok dari Kemenhub</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Lahan dan jalan akses masih terkendala</li> <li>4. Belum disarankan untuk dapat diakomodir tahun 2025</li> </ol>			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
4	Export Coaching Program	1	0	kegiatan	Provinsi Lampung	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Ditolak,

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	
Program	Kegiatan	KRO		RO	
EE - Program Perdagangan Luar Negeri	3756 - Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan	QDG - Fasilitas dan Pembinaan UMKM		001 - Export Coaching Program	
Catatan dan Tanggapan					
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
<p>Bappeda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program ECP sudah pernah dilaksanakan tahun 2021 dan 2023 di Provinsi Lampung, namun masih tetap dibutuhkan untuk mengembangkan pelaku usaha yang berpotensi melakukan ekspor</li> <li>Kementerian Perdagangan melalui Badan Pelatihan Ekspor memiliki kriteria untuk identifikasi pelaku usaha yang direkomendasikan untuk mengikuti program ini dan Badan Pelatiahn Ekspor akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan</li> <li>Untuk saat ini list rekomendasi pelaku usaha (nama UKM) belum</li> </ol>		<p>Kementerian Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terkait dengan usulan ini, Kemendag sudah menerima surat dari provinsi dan masih dalam pembahasan dengan pimpinan</li> <li>Program ini sudah dilakukan 2 kali pada tahun 2021 dan 2023, namun untuk tahun 2025 belum ada keputusan daerah mana yang akan menjadi prioritas dalam program ini.</li> <li>Meskipun Lampung sudah mengirimkan surat lebih awal, dinas harus mulai didetailkan pelaku UKM/usaha yang akan didampingi karena nantinya perlu pendampingan usaha</li> </ol>		<p>Direktorat PIKEI:</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Pimpinan Sidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika readiness criteria tersebut sudah dipenuhi, maka Bappenas akan memaksa Kemendag untuk memprioritaskan. Namun, sampai saat ini masih disiapkan (belum sampai 40 peserta), maka program tersebut dinilai belum dapat berjalan efisien</li> <li>Diharapkan daerah dapat memenuhi RC terlebih dahulu</li> </ol>	

dengan catatan RC belum siap, diharapkan daerah dapat memenuhi RC supaya dapat menjadi prioritas untuk tahun 2026

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		<p>siap dan belum tersedia sepenuhnya, masih bertahap</p> <p>Dinas Perindag</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kemendag, saat ini sedang menghimpun peserta yang akan diusulkan pada ECP Tahun 2025</li> <li>2. Permintaan kemarin adalah 40 peserta, namun baru 15 yang terhimpun</li> </ol>	<p>4. Selain Provinsi Lampung, terdapat beberapa provinsi lain yang sudah mengusulkan untuk program ECP ini</p>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
5	<p><b>Pengembangan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Lampung Berbasis Maritim (Coastal City)</b></p>	1	0	usulan	Provinsi Lampung	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	<p><b>Ditolak,</b> dengan catatan 1. Pemprov dapat berkoordinasi dengan Regional 1 Bappenas dan BPIW PUPR untuk mengidentifikasi kebutuhan dan deliniasi lokasi lebih jelas</p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		IC - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6669 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		001 - Fasilitas Penyusunan RTR Daerah		
		Catatan dan Tanggapan						

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>
		<p>Bappeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provinsi Lampung sudah memiliki Perda RTRW No 14 Tahun 2023, Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai PKN dan akan dikembangkan sebagai kawasan aglomerasi berbasis maritim</li> <li>2. Diusulkan untuk penyusunan Masterplan Aglomerasi Kawasan berbasis Maritime di Teluk Lampung (Kota Bandar Lampung, Kab Pesawaran, dan Kab. Lampung Selatan), sebagai tindak lanjut dari Masterplan Perkotaan yang telah dibuat oleh BPIW PUPR pada tahun 2017 dan untuk mendukung Metropolitan Bandar Lampung.</li> </ol>	<p>BPIW, Kementerian PUPR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian PUPR bisa berkoordinasi lebih lanjut terkait pengembangan kawasan di Provinsi Lampung</li> <li>2. Direktorat Perkotaan saat ini sedang mendorong Lampung untuk menjadi Metropolitan, karena di wilayah Sumbagsel hanya ada Metropolitan Patungraya Agung dan Lampung dirasa sudah siap untuk didorong menjadi metropolitan</li> <li>3. Tahun 2021, BPIW sempat menyiapkan rencana pembangun infrastruktur untuk pengembangan wilayah Metropolitan Lampung</li> <li>4. Perlu adanya sinkronisasi program Kementerian PUPR dan program daerah.</li> <li>5. Terkait masterplan, jika lingkup kawasan masih kecil harap diinisiasi oleh Pemda, namun jika sudah berkembang menjadi cukup besar baru diusulkan oleh daerah ke Kementerian PUPR</li> </ol>	<p>Direktorat TRPPB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian ATR/BPN bertugas memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun rencana tata ruang atau pendampingan</li> <li>2. Penyusunan masterplan bukan Tusi Kementerian ATR, jika yang diminta adalah tata ruang versi detailnya adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)</li> <li>3. Masterplan level detail dikerjakan oleh KemenPUPR bagian urban design</li> <li>4. Perlu dipertajam terkait usulan, jika terkait RDTR bisa diusulkan ke KemenATR, namun jika terkait Masterplan bisa diusulkan ke Kementerian PUPR</li> </ol> <p>Direktorat Regional I:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun 2024, Direktorat Regional I akan menyusun Masterplan untuk Bandara Lampung sebagai bagian dari Masterplan 40 Kota. Namun, lingkup sementara masih 1 kota, belum metropolitan</li> </ol>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

						<p>2. Jika memang ada kebutuhan terkait perencanaan maritime city, nanti bisa dimasukkan dalam lingkup substansi masterplan yang akan disusun</p> <p>Pimsid</p> <p>1. Daerah perlu koordinasi dengan Direktorat Rgeional I dan Kementerian PUPR untuk mengidentifikasi kebutuhan perencanaan di daerah</p>		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
6	Pelatihan dasar SDM bagi masyarakat disekitar destinasi wisata	150	150	orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Pesisir Barat</li> </ul>	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<p><b>Diakomodir</b> dengan catatan Pemerintah Daerah perlu menyiapkan proposa dan berkoordinasi dengan Kemenparekraf untuk kelengkapan RC</p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		EA - Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	4308 - Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Masyarakat yang memperoleh Fasilitas dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata		
<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
		Bappeda: -		Kememparekraf: 1. Usulan yang sudah direkomendasikan akan diakomodir, dengan catatan Pemda perlu menyiapkan proposal dan berkoordinasi lebih lanjut ke Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan, serta Deputi Destinasi dan Tata Kelola 2. Untuk volume dan anggaran akan dikoordinasikan kemudian sesuai dengan proposal yang diajukan	Direktorat IPEK 1. Usulan pelatihan dasar SDM destinasi pariwisata sudah sesuai dengan RO Kememparekraf, sehingga dapat diakomodir		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
7	Pelatihan Upskilling dan Reskilling	300	300	orang	■ Provinsi Lampung	KEMENTERIAN PENDIDIKAN,	Diakomodir, dengan catatan volume dan

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

	<b>berstandar Industri</b>					KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	anggaran akan menyesuaikan		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
						002 - Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
Bappeda: -		Kemendikbudristek 1. Usulan sudah direkomendasikan, akan diakomodir 2. Namun, untuk jumlah volume dan anggaran akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran		Direktorat APK: -					
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Hasil Kesepakatan</b>		
		<b>Usulan</b>	<b>Kesepakatan</b>			<b>a</b>			
<b>8</b>	<b>SMK yang mengembangkan Proyek Kreatif</b>	1	1	sekolah	■ Kab. Lampung Tengah	KEMENTERIAN PENDIDIKAN,	<b>Diakomodir, dengan catatan</b>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

<b>dan Kewirausahaan</b>					KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan pembangunan gedung masuk dalam program DAK dan perlu melihat RC</li> <li>2. Hanya RO PKK yang diakomodir</li> </ol>	
	<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
	01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata		
	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>			
	DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4262 - Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	042 - SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan			
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
	<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
	Bappeda -		Kemendikbud <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan diakomodir, namun perlu verifikasi apakah pemda sudah mengajukan proposal melalui aplikasi</li> <li>2. RO PKK sudah tersedia di Kemendikbud</li> <li>3. Usulan pembangunan Gedung termasuk DAK, sehingga diusulkan dalam farum DAK dengan melengkapi readiness criteria. Tahun 2024 akan dilakukan proses hibah dari Provinsi Lampung, sehingga</li> </ol>		Direktorat APK -		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

					tahun 2025 perlu diperbaiki usulan DAKnya 4. Hanya RO Proyek Kreatif dan Kewirausahaan yang diakomodir		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
9	Sarana Pascapanen Padi untuk mendukung pengembangan kawasan padi	132	132	unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Lampung Barat</li> <li>■ Kab. Tanggamus</li> <li>■ Kab. Lampung Selatan</li> <li>■ Kab. Lampung Timur</li> <li>■ Kab. Lampung Tengah</li> <li>■ Kab. Lampung Utara</li> <li>■ Kab. Way Kanan</li> <li>■ Kab. Tulang Bawang</li> <li>■ Kab. Pesawaran</li> <li>■ Kab. Pringsewu</li> <li>■ Kab. Mesuji</li> </ul>	KEMENTERIAN PERTANIAN	<b>Diakomodir</b> , dengan catatan untuk alokasi dan volume akan disesuaikan dengan pagu Kementrian Pertanian

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

					<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Tulang Bawang Barat</li> <li>■ Kab. Pesisir Barat</li> <li>■ Kota Metro</li> </ul>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		02 - Transformasi Ekonomi	02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>	
		EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5885 - Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	RAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		001 - Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
		Bappeda: -		Kementan 1. RO sudah sesuai, namun volume akan mengikuti dari pagu anggaran Kementan		Direktorat PP: 1. Usulan sudah sesuai dengan RO Kawasan Padi 2. Untuk alokasi dan volume akan disesuaikan dengan pagu Kementan	
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		Usulan	Kesepakatan			Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
<b>10</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Miskin Untuk Pengurangan Beban Terkait Kebutuhan Dasar</b>	3000	3000	KPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Lampung Utara</li> <li>■ Kab. Pesisir Barat</li> </ul>	KEMENTERIAN SOSIAL	<b>Diakomodir,</b> dengan catatan untuk calon penerima sudah harus masuk dalam data DTKS dan perlu penyesuaian RO		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>			<b>RO</b>	
		DQ - Program Perlindungan Sosial	6896 - Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako		QEB - Bantuan Keluarga			101 - KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		Bappeda: -		Kementerian Sosial: 1. Usulan berkaitan dengan program Kemensos, kuota penerima kartu sembako di Provinsi Lampung adalah 645.359 KPM		Direktorat PKPM: 1. Usulan dapat diakomodir 2. Untuk nomenklatur perlu disempurnakan dan disesuaikan menjadi RO Kemensos			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

			2. Unruk calon penerima harus masuk dalam data DTKS						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Untuk Peningkatan Pendapatan	500	500	orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Lampung Utara</li> <li>■ Kab. Pesisir Barat</li> </ul>	KEMENTERIAN SOSIAL	Diakomodir, dengan catatan perlu perbaikan nomenklatur (sudah tercantum dalam catatan Rakortek)		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		DQ - Program Perlindungan Sosial	6883 - Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial	QEB - Bantuan Keluarga		101 - KPM yang dirujuk untuk mendapatkan program pendampingan usaha			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		Bappeda: -		Kemensos 1. Untuk Program PENA tidak ada kuota secara provinsi, sehingga volume akan menyesuaikan 2. Kewenangan daerah: melanjutkan program pendampingan, fasilitasi dan rujukan yang dapat menunjang keberlanjutan program PENA (co-sharing) 3. Tahun 2022 terdapat 35 penerima manfaat di Provinsi Lampung dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 135 KPM, sehingga jika mengusulkan volume sebanyak 500 masih diperbolehkan 4. Proposal dapat diajukan ke Menteri Sosial 5. Syarat utama: 1) harus DTKS, 2) prioritas penerima Bansos PKK, Sembako, RST dengan interval usia produktif 20-45 tahun		Direktorat PKPM: 1. Usulan dapat diakomodir, namun nomenklatur perlu disesuaikan menjadi RO Kemensos (sudah tercantum dalam catatan Rakortek)	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
12	Pengembangan Kawasan Peternakan	5	5	Titik/lokasi	■ Kab. Pringsewu	KEMENTERIAN PERTANIAN	Diakomodir, dengan catatan hanya RO Ternak

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

<b>Kambing Berbasis Korporasi di Provinsi Lampung</b>					Ruminansia Potong yang diakomodir	
	<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>			<b>Arah Pembangunan Nasional</b>
	02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan			16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>			<b>RO</b>
	EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5891 - Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			001 - Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
	<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>			<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>
<p>Bappeda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian yang mentakan bahwa Provinsi Lampung ditetapkan sebagai kawasan prioritas nasional untuk komoditas sapi dan kambing berbasis korporasi</li> </ol> <p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai kawasan prioritas nasional komoditas sapi dan kambing, diharapkan dapat</li> </ol>		<p>Kementerian Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk RO Sarana Pembibitan Ternak tidak ada untuk komoditas kambing -&gt; hanya untuk ruminansia potong dan sapi perah</li> <li>Untuk komoditas kambing dapat masuk dalam RO Ternak Ruminansia Perah (untuk kambing perah) dan RO Ternak Ruminansia Potong (untuk kambing potong)</li> </ol>		<p>Direktorat PP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komponen yang diusulkan cukup beragam dan tidak terfokus pada 1 RO</li> <li>Kawasan korporasi tersedia, namun bukan untuk komoditas kambing, hanya untuk komoditas sapi potong</li> <li>RO yang tersedia dan dapat dipilih oleh Pemda:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana: RO Sarana Pembibitan Ternak</li> <li>Blmtek: RO Lembaga yang</li> </ol> </li> </ol>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		<p>mendukung ketahanan pangan hewani dan meningkatkan kesejahteraan</p> <p>2. Korporasi ini akan dikelola dari hulu ke hilir, lokasi di Kab Pringsewu (5 desa)</p> <p>3. Dibutuhkan bibit ternak, pakan, mesin, kandang kelompok, pengolahan hiliriasi produksi pengolahan dan pupuk kompos, serta peningkatan SDM</p> <p>4. RO yang dipilih: RO Ternak Ruminansia Potong</p>	<p>3. RO Ternak Ruminansia Potong dapat diakomodir, dengan catatan harus memenuhi beberapa persyaratan: melengkapi isian pada e-proposal, polygon area yang akan dijadikan area pembibitan, dan lainnya</p>	<p>tereduksi akses pembiayaan investasi, jaringan pemasaran, dan ekspor</p> <p>3) RO sarana pengolahan dan pemasaran hasil ternak</p> <p>4) RO prasarana pengolahan dan pemasaran hasil ternak</p> <p>4. Untuk RO sarana perbibitan ternak sudah ada alokasi, namun perlu konfirmasi Kementan</p>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
13	Pembangunan Rumah Potong Hewan	1	0	unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Lampung Tengah</li> </ul>	KEMENTERIAN PERTANIAN	<p><b>Ditolak</b></p> <p>Dengan catatan</p> <p>1) Untuk dapat diusulkan melalui pembiayaan DAK, daerah harap menyiapkan RC.</p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

	HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1786 - Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RBK - Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 - Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	2) Dit. PP dan Dit. Reg 1 Bappenas dalam pembahasan DAK tahun 2025: (a.) mendukung dan mendorong supaya menu DAK yang selama ini hanya revitalisasi, berubah menjadi pembanguan dan rehabilitasi RPH (b.) Provinsi Lampung diprioritaskan untuk menjadi lokpri tahun 2025
<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
	<p>Bappeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan untuk pembangunan rumah potong hewan di Kab. Lampung Tengah</li> <li>Kab. Lempauung Tengah merupakan sentra sapi potong (rakyat dan swasta), belum ada RPH milik pemerintah disana</li> </ol> <p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Didasari oleh usulan Bupati Lampung Tengah karena belum ada RPH di Lampung Tengah</li> <li>Kab. Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan populasi sapi tertinggi di Provinsi Lampung</li> <li>Sesuai dengan PP 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang produk halal dimana setiap produk pangan untuk ruminansia maupun unggas harus melalui</li> </ol>	<p>Kementerian Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan RPH belum bisa diakomodir melalui APBN karena tidak ada alokasi untuk RPH, disarankan untuk melalui pembiayaan DAK</li> <li>Tahun 2024 tidak ada pembangunan, hanya ada renovasi dan rehabilitasi, diusulkan untuk tahun 2025 ada menu pembangunan dalam DAK, namun sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan</li> </ol>	<p>Direktorat PP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terkait usulan terkait Rumah Potong Hewan, pembangunan RPH tidak ada RO dengan pembiayaan APBN, diusulkan melalui DAK Fisik</li> <li>Untuk Menu RPH dalam DAK Fisik tahun 2025 saat ini masih dalam tahap pembahasan (menu DAK tahun sebelumnya ada RPH)</li> <li>Sarana prasaran dapat diusulkan untuk RO berbeda, namun tidak untuk RO pembangunan</li> </ol> <p>Direktorat Regional I</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan ini sudah dibahas di Rakortek dan bersatatus dibahas lebih lanjut sehingga ada kemungkinan untuk melalui pembiayaan APBN,</li> </ol>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		RPH yang sudah bersertifikasi halal 4. Sudah pernah diusulkan dalam forum DAK sejak tahun 2021, namun belum pernah diakomodir (tidak pernah menjadi lokpri)			namun perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketersediaan RO 2. Dari sisi kebutuhan, usulan ini memang mendukung			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
14	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	6	6	Hektar	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Lampung Barat</li> <li>■ Kab. Tanggamus</li> <li>■ Kab. Way Kanan</li> </ul>	KEMENTERIAN PERTANIAN	<b>Diakomodir,</b> dengan catatan 1. Daerah menyampaikan data dukung kepada Kementan 2. Volume menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5888 - Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan		006 - Kawasan Kopi		
		Catatan dan Tanggapan						

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>
		<p>Bappeda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopi Lampung terutama robusta sudah terkenal</li> <li>2. Pemerintah Provinsi Lampung ingin mengembangkan sistem pagar untuk kopi arabica dan kopi robusta</li> <li>3. Kebutuhan daerah: benih, pupuk, pestisida, alat pertanian, pekerja, dan bimbingan teknis</li> <li>4. Kab. Lampung Barat memungkinkan untuk mengembangkan kopi arabica (ketinggian diatas 1000 mdpl), sudah berhasil pengembangannya dilakukan oleh petani kopi</li> <li>5. Pasar kopi arabica langsung diambil oleh eksportir dan kebutuhannya memang masih tinggi</li> </ol> <p>Dinas Perkebunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan sistem pagar sudah fix, namun geotagging masih dalam bentuk titik dan akan disesuaikan menjadi polygon</li> <li>2. Rencana akan dilakukan di 3 kabupaten</li> </ol>	<p>Kementan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RO sudah sesuai, nanun tidak termasuk untuk kopi arabica, pengembangan kawasan kopi hanya untuk kopi robusta dengan komponen intensifikasi tanaman kopi termasuk bibit dan pupuk (tidak termasuk untuk pestisida)</li> <li>2. Menu untuk kopi arabica tersedia, namun untuk Provinsi Lampung bukan prioritas</li> <li>3. Untuk proposal harap disampaikan melalui sistem aplikasi Bima</li> <li>4. Perlu informasi data keberhasilan kopi arabica di Provinsi Lampung</li> <li>5. Terkait potensi pengembangan kopi arabica, harap dapat disampaikan dalam forum Musrenbang Pertanian (Musrenbangtan)</li> </ol>	<p>Direktorat PP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RO kawasan kopi sudah sesuai, RO ini sudah menglaokasikan untuk benih dan pupuk tanaman kopi</li> <li>2. Alokasi dan volume akan disesuaikan dengan Pagu Kementan</li> <li>3. Jika data dukung sudah siap, maka usulan pengembangan kopi arabica dapat didukung (RC: CPCL by name by address dan diusulkan melalui e-proposal)</li> </ol>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		3. RO yang diusulkan adalah peremajaan atau replanting kopi, dengan komponen benih, pupuk, dan pestisida						
		4. Untuk pengembangan kopi arabica belum pernah diusulkan ke Kementan, namun CPCL sudah ada di Kab. Lampung Barat						
		5. Sistem pagar kopi arabica di Lampung Barat sudah berhasil memproduksi kopi 4-5 ton/hektar						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
15	Perencanaan dan Pengawasan Teknik / Survei Topografi Tugu Cokelat, Pesawaran - Gedongtataan	1	1	dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Pesawaran</li> </ul>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	RBR - Dukungan Teknis		027 - Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik (IKN)		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

No	Usulan	Catatan dan Tanggapan				Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas		
		<p>Bappeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Timur Lampung sudah ada jalan tol, namun di Kawasan Barat Lampung masih terdapat jalan nasional lintas barat yang lebarnya terbatas dan hampir setiap hari ada kemacetan.</li> <li>2. Jalan nasional lintas barat sangat padat dan perlu pelebaran jalan, sehingga diusulkan Perencanaan Survei Topografi dari Tugu Coklat (Kab. Pesawaran) sampai Gedong Tataan (Ibu Kota Kab. Pesawaran)</li> <li>3. Usulan ini sudah diusulkan di Konreg PUPR, sudah disepakati oleh BPJN dan masuk dalam baseline</li> </ol>		<p>BPIW, Kementerian PUPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan tidak masuk dalam rakortek, namun sudah masuk dalam usulan konsultasi provinsi kepada Kementerian PUPR</li> <li>2. Kegiatan ini baru bisa masuk ke pembangunan fisik sekitar 2-3 tahun ke depan</li> <li>3. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu memastikan program kedepannya setelah perencanaan survey topografi</li> </ol>			
Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
Usulan	Kesepakatan						
16	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota TPST	35000	0	KK	<input checked="" type="checkbox"/> Provinsi Lampung	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<b>Ditolak</b> , dengan catatan seluruh penyiapan RC

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

<b>Sukadana, Karangrejo, dan Bumi Ayu</b>	<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		tetap harus diproses dan harap diusulkan kembali untuk tahun 2026	
	01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		01 - Kesehatan untuk Semua			
	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
	IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4840 - Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		007 - Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota			
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
	<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
	<p>Bappeda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan sudah disepakati sebagai usulan baru dalam Konreg PUPR</li> <li>Lokasi masuk dalam Metropolitan Lampung (Sukadana, Metro, dan Bumi Ayu)</li> <li>Ada permasalahan timbunan sampah yang semakin banyak dan menyebabkan proses ke TPA terlambat</li> <li>Untuk TPTS Sukadana sudah ada DED, TPST Bumi Ayu sudah ada laporan akhir kajian, laporan akhir UKL UPL 2022, untuk TPST Karangrejo ada DED dan justifikasi lahan</li> </ol>		<p>BPIW, Kementerian PUPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah dilakukan survey di Kota Metro dan kebutuhan memang mendesak</li> <li>Namun, masih memerlukan izin lingkungan (RC belum siap)</li> </ol>		<p>Direktorat Perkim:</p> <p align="center">-</p>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		<p>Dinas PKCPK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan TPST diajukan langsung oleh kabupaten/kota langsung kepada BPPW</li> </ol> <p>BPPW:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kab/kota baru mengetahui usulan ini (Metro dan Pringsewu sudah melakukan koordinasi dengan BPPW, namun untuk Lampung Timur masih belum ada konfirmasi)</li> <li>Untuk Kota Metro dan Pringsewu masih proses melengkapi RC (DED dan Amdal), diberikan deadline sampai Juni 2024</li> </ol>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
17	Flood Risk Management of Bandar Lampung City (Masterplan Pengendalian	1	0	dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Bandar Lampung</li> </ul>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<p><b>Ditolak,</b> dengan catatan sudah termasuk dalam rencana PSDA dari</p>
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

<b>Banjir Perkotaan Bandar Lampung</b>	03 - Transformasi Tata Kelola		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Kementerian PUPR	
	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>		<b>RO</b>
	FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5037 - Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai		RBR - Dukungan Teknis		501 - Engineering Service Project for Multipurpose Dams, Rivers and Coastal
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
	<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>			<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>
	<p>Bappeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Musim hujan menyebabkan banyak titik terjadi banjir. Kota Bandar Lampung mengalami banjir di 20 titik.</li> <li>Sudah ada masterplan banjir, namun terlalu micro</li> <li>Masterplan ini termasuk dalam tugas BBWS, sudah dibahas dalam Konreg PUPR dan diusulkan untuk menyusun Flood Risk Management of Bandar Lampung</li> </ol>		<p>Dirjen SDA, Kementerian PUPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memang dibutuhkan untuk perencanaan pengendalian banjir di Provinsi Lampung</li> <li>Tahun 2025 sudah ada rencana DED pengendalian banjir untuk Provinsi Lampung dari Kementerian PUPR</li> <li>Wilayah Sungai Di Provinsi Lampung masuk dalam wilayah sungai kewenangan pusat dan sudah terdapat rencana PSDA</li> </ol> <p>BPIW, Kementerian PUPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Secara komprehensif sudah ditetapkan dalam Peraturan</li> </ol>			<p>Direktorat SDA Bappenas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanganan dan pengendalian banjir perkotaan termasuk dalam prioritas RPJMN dan didorong untuk diakomodir</li> </ol>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

			Menteri PUPR, salah satu yang diatur juga terkait masalah banjir. 2. Tahun 2025 akan menyusun DED, maka sudah masuk dalam program						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
18	Peningkatan dan Pengembangan Sarana UPTD Balai Inseminasi Buatan Provinsi Lampung Menuju ISO 17025:2017	1	0	paket	Kab. Lampung Tengah	KEMENTERIAN PERTANIAN	Tidak dibahas		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1785 - Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	RAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		001 - Sarana Perbibitan Ternak			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
19	Pembangunan Cold Storage di Kabupaten Lampung Timur	1	0	unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kab. Lampung Timur</li> </ul>	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tidak terbahas	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
		EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2358 - Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	QEG - Bantuan Peralatan / Sarana		001 - Sarana sistem rantai dingin Hasil KP		
<b>Catatan dan Tanggapan</b>								
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
20	Smart Farming Hortikultura	1	0	Paket	<input checked="" type="checkbox"/> Kab. Pringsewu	KEMENTERIAN PERTANIAN	Tidak terbahas	
		<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi	04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
		HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1771 - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan		011 - Kawasan Aneka Cabai		
<b>Catatan dan Tanggapan</b>								
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI LAMPUNG**

		-	-	-	
--	--	---	---	---	--

**3. REKAPITULASI**

<b>HASIL KESEPAKATAN</b>	<b>TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN</b>
Diakomodir	<b>11</b>
Ditolak	<b>6</b>
Tidak Terbahas	<b>3</b>